



Eksklusi Sosial Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Bulukumba

Nurwandyani^{1*}, Fatimah Azis², Syarifuddin³

^{1,2,3}Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

**Email Correspondence: nurwandyani22@gmail.com*

Abstract

This study aims to uncover and analyze the forms of social exclusion experienced by underprivileged families in Padang Village, Bulukumba Regency. Social exclusion is a complex phenomenon in which individuals or groups are marginalized from access to social, economic, political, and cultural resources. In this context, low-income families face significant barriers in accessing basic services such as education, healthcare, housing, and decent work, which reinforces the cycle of poverty and social isolation. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving underprivileged families and relevant informants in Padang Village. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through triangulation of sources, time, theory, and expert review. The primary focus of this study is to gain an in-depth understanding of social dynamics, power structures, and structural and cultural factors that drive exclusion. The research findings indicate that the forms of social exclusion experienced by underprivileged families include limited access to public services, social marginalization, and a lack of power in political and economic participation. Contributing factors include socioeconomic inequality, low levels of education, social discrimination, and weak inclusive policies from local governments. These findings demonstrate that social exclusion stems not solely from economic conditions, but also from unequal social relations and power structures that disadvantage vulnerable groups. This study is expected to provide a foundation for developing more equitable and inclusive policies for underprivileged communities.

Keywords: Social exclusion, underprivileged families, poverty, padang village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis bentuk-bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga prasejahtera di Desa Padang, Kabupaten Bulukumba. Eksklusi sosial merupakan fenomena yang kompleks, di mana individu atau kelompok masyarakat tertentu terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, keluarga miskin mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dan keterasingan sosial yang mereka alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap anggota keluarga prasejahtera dan informan terkait di Desa Padang. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan

data dijamin dengan teknik triangulasi sumber, waktu, teori, dan pakar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, struktur kekuasaan, serta faktor-faktor penyebab eksklusi yang bersifat struktural maupun kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk eksklusi sosial yang dialami keluarga prasejahtera meliputi keterbatasan akses terhadap layanan publik, pengucilan dalam kehidupan sosial, serta ketidakberdayaan dalam partisipasi politik dan ekonomi. Faktor penyebabnya antara lain ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya pendidikan, diskriminasi sosial, dan lemahnya kebijakan inklusif dari pemerintah setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial tidak hanya bersumber dari kondisi ekonomi semata, melainkan juga dari relasi sosial dan struktur kekuasaan yang tidak berpihak kepada kelompok rentan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat prasejahtera.

Kata Kunci: Eksklusi sosial, keluarga prasejahtera, kemiskinan, desa padang

Pendahuluan

Eksklusi sosial atau yang disebut dengan marginalisasi sosial adalah sebuah bentuk dari tindakan untuk melakukan penyingkiran dan juga melakukan pengucilan ke dalam sebuah bentuk dari pingiran masyarakat. Eksklusi sosial adalah fenomena di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang seharusnya dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Keluarga prasejahtera sering menghadapi kehidupan yang penuh keterbatasan. Kondisi ekonomi yang lemah membuat mereka sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan administratif. Situasi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup mereka, tetapi juga mempersempit kesempatan untuk keluar dari kondisi prasejahtera.

Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap eksklusi sosial adalah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan yang mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sering kali menjadi penyebab utama marginalisasi sosial. Selain itu, secara psikologis ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terasing dari kehidupan sosial dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, depresi, dan ketidakpuasan hidup yang mendalam. Contoh dari aspek pendidikan, untuk dapat meningkatkan kesadaran anak atau peserta didik untuk tetap sekolah diperlukan dukungan dan dorongan orang tua. Dimana apabila orang tua peduli terhadap pendidikan anak-anaknya pasti mereka akan terus memotivasi anak supaya tetap melanjutkan sekolah. Serta bisa menimbulkan efek berantai.

Walsh & Urbaniak, (2023) mengatakan bahwa eksklusi sosial merupakan sebuah proses yang dinamis terkait pengucilan pada individu dari sistem sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang menentukan integritas individu di dalam masyarakat. Sebaliknya bila orang tua tidak peduli terhadap pendidikan anaknya maka mereka tidak ada motivasi untuk terus melanjutkan sekolah. Hal di atas membuktikan bahwa perlu adanya kerjasama dan perhatian yang baik antara pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) serta pihak keluarga atau orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak atau peserta didik supaya mereka dapat termotivasi di dalam belajar demi tercapainya cita-cita yang mereka inginkan. Sehingga membuat mereka merasa nyaman dan tidak sendirian (Anwar et al., 2016).

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Anggi Anwar, 2023; Ramdass, 2010). Di sisi lain,

mereka yang diasingkan atau dikucilkan biasanya berasal dari kelas sosial yang lebih rendah, yang seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan atau pengaruh dalam komunitas itu.

Eksklusi sosial seperti terjadi di sekolah subjek, menurut de Leeuw et al. (2018), bisa menimbulkan efek berantai. Mereka mengkonfirmasi melalui puluhan eksperimennya, bahwa anak yang terkesklusi dari lingkungan sosialnya justru menjadi lebih agresif bahkan kepada siswa lain yang tidak mengganggu dirinya, tidak bersedia membantu dan bekerjasama tim, berperilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, suka menunda-nunda, dan memiliki kemampuan penalaran yang buruk (Lestari et al., 2022). Individu yang terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas cenderung memiliki peluang yang terbatas dalam hal pekerjaan, penghasilan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Maulana, 2023).

Eksklusi sosial dapat digambarkan melalui bentuk partisipasi sosial yang tidak memadai, kurang terintegrasi, dan kurangnya power di dalamnya. Hal ini dapat menjelaskan sejauh mana hak-hak ditolak dan menjadikan beberapa kelompok menjadi tereksklusi (Arif Muhibbin, 2021). Eksklusi sosial berarti keluarga-keluarga ini tidak bisa ikut serta secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Mereka sering diabaikan oleh sistem sosial dan lingkungan sekitar, sehingga merasa tidak dihargai. Misalnya, mereka dijauhi dari aktivitas komunitas, diperlakukan berbeda dalam sekolah, atau tidak diakomodasi dalam program sosial. Akibatnya, eksklusi sosial berdampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga pada kesehatan mental dan interaksi sosial mereka. Banyak keluarga miskin yang anaknya putus sekolah karena merasa dikucilkan di lingkungan pendidikan. Stereotip negatif memperparah tekanan psikologis yang mereka rasakan sehari-hari.

Mengangkat isu ini dalam artikel penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama menemukan strategi pemberdayaan. Misalnya, program berbasis modal sosial dan komunitas, seperti pemanfaatan aset lokal dan penguatan jaringan sosial, dapat membantu memutus siklus eksklusi. Dengan langkah konkret seperti itu, eksklusi sosial tidak lagi hanya masalah individu, melainkan bisa dihadapi sebagai tantangan sistemik yang menuntut solusi kolektif dan berkelanjutan. Penelitian mengenai eksklusi sosial terhadap keluarga miskin sangat relevan, baik untuk memahami fenomena sosial ini maupun untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Fokus pada kelompok ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai dampak kemiskinan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka Manangkalangi et al., (2020), serta mengeksplorasi cara agar kebijakan publik bisa lebih efektif dalam mengatasi eksklusi sosial.

Pasondi, (2024) menyatakan bahwa terdapat konsensus seputar lima atribut utama dari konsep eksklusi sosial. Pertama, multidimensi yang melintasi berbagai indikator standar hidup termasuk lingkungan atau sumber daya masyarakat. Kedua, dinamis dimana hubungan tidak hanya dengan situasi saat ini tetapi juga dengan prospek di masa depan. Ketiga, relatif hal ini menyiratkan pengucilan dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Keempat, hak pilihan yang berada diluar tanggung jawab sempit individu. Kelima, relasional artinya diskontinuitas besar dengan seluruh masyarakat (Al-faiza et al., 2025).

Penelitian mengenai eksklusi sosial terhadap keluarga miskin sangat relevan, baik untuk memahami fenomena sosial ini maupun untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Fokus pada kelompok ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai dampak kemiskinan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka, serta mengeksplorasi cara agar kebijakan publik bisa lebih efektif dalam mengatasi eksklusi sosial. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pemerintahan desa setempat dalam upaya membangun masyarakat yang harmoni serta meminimalisir terjadinya praktik eksklusi sosial dalam masyarakat desa (Al-faiza et al., 2025).

Metode

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Cresswell, 2017; Sugiyono, 2020), metode observasi dan wawancara, dan dokumentasi sebagai fondasi utama untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi atau peristiwa yang relevan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat menyaksikan perilaku, interaksi, dan dinamika yang berlangsung secara alami. Sementara itu, wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai perspektif, pengalaman, dan pandangan individu yang terkait dengan topik yang diteliti. Dengan memadukan observasi dan wawancara, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti serta menjelajahi dan mendalami aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap jelas melalui satu metode saja. Adapun analisis data yang digunakan ini mengikuti prosedural ilmiah yang berdasarkan pada Miles et al., (2014) yang berupa pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), menggambar dan memverifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

Hasil dan Pembahasan

Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera bukan hanya mengenai kemiskinan, tetapi juga tentang posisi mereka dalam konteks masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga yang berada dalam kondisi terbatas justru tidak menerima perlakuan yang serupa dengan kelompok lain yang lebih berkecukupan. Mereka kerap kali harus menghadapi fakta bahwa akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang baik menjadi sangat sulit diperoleh. Saat mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar sekolah anak, berobat ke rumah sakit, atau mengikuti pelatihan kerja, otomatis mereka akan tertinggal dari kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat lain.

Berbagai bentuk eksklusi sosial ini timbul dalam banyak aspek, baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin menerima perlakuan yang berbeda di sekolah karena tidak dapat membeli seragam baru atau peralatan belajar yang memadai. Dalam lingkungan domestik, keluarga yang kurang mampu mungkin sering diabaikan dalam aktivitas masyarakat atau dianggap rendah karena dianggap tidak memberikan sumbangan. Bahkan dalam kebijakan sosial, mereka sering kali tidak didengar karena kesulitan dalam mengakses informasi atau minimnya perwakilan. Semua ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial bukan hanya mengenai ketidakberdayaan, tetapi juga soal ketidakdiakui. Hal ini dapat menjelaskan sejauh mana hak-hak ditolak dan menjadikan beberapa kelompok menjadi tereksklusi (Arif Muhibbin, 2021)

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa padang terletak di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki posisi yang strategis karena menjadi jalur penghubung transpostasi dari Kota Bulukumba menuju Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Desa Padang memiliki luas daerah kurang lebih 1.108km² yang meliputi 4 dusun yaitu dusun Palimassang, Borong Cinranae, mattoangin dan Bt. Bulaeng. Desa ini berada pada ketinggian 0 hingga 1.000 meter diatas permukaan laut.

Penduduk Desa Padang tercatat sebanyak 4.039 jiwa, yang terdiri 2.119 jiwa dari laki-laki dan 1.920 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.051 Berikut dta tabel jumlah penduduk di desa Padang.

No	Dusun	Jumlah Penduduk			
		Jumlah Kk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Palimassang	261	125	136	1.047
2	Br. Cinranae	245	150	95	980
3	Mattoanging	166	82	84	1.000
4	Bt. Bulaeng	337	180	157	1.012
Jumlah		1009	1811	472	4.039

Tabel 1. Demografi Desa Padang

Data kependudukan yang dihimpun dari empat dusun menunjukkan adanya variasi jumlah penduduk dan kepala keluarga yang mencerminkan karakteristik sosial masing-masing wilayah. Dusun Palimassang tercatat memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni 1.047 jiwa dengan 261 kepala keluarga. Komposisi gender di dusun ini relatif seimbang, meskipun jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa Palimassang merupakan salah satu pusat permukiman yang cukup padat.

Dusun Baruga Cinranae menempati posisi kedua dari segi jumlah kepala keluarga, yaitu 245 KK, dengan total penduduk 980 jiwa. Menariknya, jumlah penduduk laki-laki di dusun ini lebih tinggi dibanding perempuan, yang dapat menggambarkan adanya karakteristik sosial tertentu seperti dominasi laki-laki pada sektor pekerjaan lokal atau kecenderungan mobilitas penduduk perempuan ke wilayah lain. Sementara itu, Dusun Mattoanging memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit, yakni 166 KK, namun total penduduknya mencapai 1.000 jiwa. Hal ini mengindikasikan ukuran rata-rata anggota keluarga yang relatif besar. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, sehingga tidak terdapat kesenjangan gender yang signifikan. Dusun Bonto Bulaeng merupakan wilayah dengan jumlah kepala keluarga tertinggi, yaitu 337 KK, dengan total penduduk 1.012 jiwa. Meskipun memiliki KK terbanyak, jumlah penduduknya tidak berbeda jauh dari dusun lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga di Bonto Bulaeng cenderung memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit dibanding dusun lainnya.

Secara keseluruhan, keempat dusun tersebut memiliki total 1.009 KK dengan akumulasi 4.039 jiwa. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam data rekapitulasi jumlah perempuan yang tercantum jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi perhitungan demografis.

Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera Desa Padang Kabupaten Bulukumba

Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera bukan hanya mengenai kemiskinan, tetapi juga tentang posisi mereka dalam konteks masyarakat (Anwar et al., 2016). Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga yang berada dalam kondisi terbatas justru tidak menerima perlakuan yang serupa dengan kelompok lain yang lebih berkecukupan (Dulkhan & Nurjanah, 2018). Mereka kerap kali harus menghadapi fakta bahwa akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang baik menjadi sangat sulit diperoleh. Saat mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar sekolah anak, berobat ke rumah sakit, atau mengikuti pelatihan kerja, otomatis mereka akan tertinggal dari kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat lain (Riyansyah, 2011).

Berbagai bentuk eksklusi sosial ini timbul dalam banyak aspek, baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin menerima perlakuan yang berbeda di sekolah karena tidak dapat membeli seragam baru atau peralatan belajar yang memadai. Dalam lingkungan domestik, keluarga yang kurang mampu mungkin sering diabaikan dalam aktivitas masyarakat atau dianggap rendah karena dianggap tidak

memberikan sumbangan. Bahkan dalam kebijakan sosial, mereka sering kali tidak didengar karena kesulitan dalam mengakses informasi atau minimnya perwakilan. Semua ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial bukan hanya mengenai ketidakberdayaan, tetapi juga soal ketidakdiakui (Pasondi, 2024).

Eksklusi sosial atau yang disebut dengan marginalisasi sosial adalah sebuah bentuk dari tindakan untuk melakukan penyingkiran dan juga melakukan pengucilan ke dalam sebuah bentuk dari pinggiran masyarakat. Eksklusi sosial adalah fenomena di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang seharusnya dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Dalam tindakan eksklusi sosial itu sendiri biasanya terjadi kemiringan atau ketidak sesuai antara data yang benar membutuhkan bantuan dengan data yang seharusnya tidak diperuntukkan. Studi mengenai eksklusi sosial melalui wawancara memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai jenis penolakan dan pengucilan yang dialami oleh individu dan kelompok di masyarakat. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang, Kabupaten Bulukumba, merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Eksklusi ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, kultural, politik, dan institusional yang saling berkaitan. Keluarga prasejahtera tidak hanya mengalami keterbatasan materi, tetapi juga menghadapi hambatan struktural seperti akses informasi yang terbatas, minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta stigma negatif yang melekat. Situasi ini diperburuk dengan kebijakan yang sering kali tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sehingga bantuan yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menambah rasa terasing.

Pengalaman langsung para informan menggambarkan adanya perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam penyaluran bantuan maupun akses layanan publik. Banyak warga mengeluhkan bantuan sosial yang dihentikan secara sepihak tanpa verifikasi mendalam, atau program yang tidak diumumkan secara luas sehingga hanya pihak tertentu yang mendapat manfaat. Ketidakmerataan informasi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan akses antara warga yang memiliki hubungan dekat dengan aparat desa dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Fenomena ini menegaskan bahwa eksklusi sosial kerap bersumber dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam distribusi sumber daya.

Faktor ekonomi tetap menjadi penyebab utama, di mana sebagian besar keluarga prasejahtera menggantungkan hidup pada pekerjaan serabutan dengan pendapatan tidak menentu (Anwar et al., 2016). Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Pasondi, 2024). Anak-anak dari keluarga miskin sering terpaksa berhenti sekolah karena biaya, sementara layanan kesehatan dihindari akibat keterbatasan dana atau pencabutan BPJS (Maulana, 2023). Keterbatasan pendidikan semakin memperkuat siklus kemiskinan dan mempersempit peluang kerja yang layak (Pasondi, 2024).

Selain faktor ekonomi, stigma sosial menjadi penghalang signifikan bagi integrasi mereka dalam komunitas. Masyarakat sering memandang keluarga miskin sebagai pihak yang pasif, malas, atau hanya menunggu bantuan (Anggi Anwar, 2023). Pandangan ini menurunkan rasa percaya diri mereka dan membuat mereka enggan terlibat dalam kegiatan sosial. Stigma tersebut tidak hanya menciptakan jarak psikologis, tetapi juga memengaruhi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi diri. Diskriminasi juga terjadi di sektor pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak diikutsertakan dalam kegiatan tertentu hanya karena alasan ekonomi.

Interpretasi ini selaras dengan teori konflik Ralf Dahrendorf, yang menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan otoritas akan melahirkan hubungan sosial yang timpang. Keluarga prasejahtera berada pada posisi yang lemah, tanpa akses penuh ke forum pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka sering terabaikan. Ketika kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu, distribusi bantuan dan layanan publik menjadi tidak merata. Akibatnya, mereka semakin terpinggirkan baik secara sosial maupun ekonomi.

Dari sudut pandang psikologis, eksklusi sosial meninggalkan dampak mendalam pada individu maupun keluarga. Perasaan diabaikan, tidak dihargai, dan kehilangan tempat dalam masyarakat menciptakan trauma sosial yang mempengaruhi generasi berikutnya. Rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan menghambat mereka untuk mencari bantuan atau memperjuangkan hak. Tanpa adanya intervensi yang tepat, lingkaran kemiskinan dan keterasingan ini akan terus berlanjut.

Oleh karena itu, upaya mengatasi eksklusi sosial memerlukan pendekatan yang menyentuh semua aspek kehidupan keluarga prasejahtera. Tidak cukup hanya memberikan bantuan material, tetapi juga harus memperbaiki mekanisme pendataan, memperluas akses informasi, dan menciptakan ruang partisipasi yang setara. Pemerintah desa dan masyarakat perlu melihat keluarga prasejahtera sebagai bagian penting dari komunitas, yang memiliki potensi dan hak yang sama untuk berkembang. Kebijakan yang inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil lapangan adalah kunci untuk memutus rantai eksklusi sosial di Desa Padang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga prasejahtera mengalami eksklusi sosial dalam berbagai aspek yang saling terkait dan memperburuk kondisi kemiskinan yang mereka hadapi. Secara spesifik, hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keluarga prasejahtera menghadapi pengecualian ekonomi, yang ditunjukkan oleh kurangnya akses kepada pekerjaan yang baik dan penghasilan yang memadai. Mereka biasanya beroperasi di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera terjadi dalam berbagai bentuk saling terkait, seperti eksklusi ekonomi (minimnya pekerjaan dan pendapatan layak), eksklusi institusional (akses terbatas terhadap layanan publik), serta eksklusi sosial dan politik (stigma, diskriminasi, dan keterpinggiran dalam pengambilan keputusan). Keluarga prasejahtera mengalami stigma dan diskriminasi. Mereka sering dianggap buruk oleh masyarakat sekitar, dipersepsikan sebagai pemalas atau hanya mengandalkan bantuan. Pandangan ini membuat mereka merasa rendah diri, malu, dan menjauh dari interaksi sosial.
2. Faktor utama penyebab eksklusi ini mencakup struktur sosial dan birokrasi yang tidak inklusif, rendahnya akses informasi, pandangan negatif masyarakat, serta tidak adanya ruang partisipasi politik bagi keluarga prasejahtera, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan dan keterasingan sosial.

Dengan demikian, pengucilan sosial terhadap keluarga prasejahtera bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga masalah struktural dan kultural. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penanganan yang menyeluruh, mencakup perbaikan sistem layanan publik, penghapusan label sosial, dan keterlibatan aktif keluarga prasejahtera dalam aktivitas sosial serta politik di komunitas mereka.

Referensi

- Al-faiza, A. P. A., Fitri, N. L., Tsany, A., & Aqilah, A. F. (2025). Eksklusi Sosial dalam Pendidikan: Analisis Komparatif Indonesia dan Vietnam. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 3(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198>
- Anggi Anwar, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Periode 2002-2021 Analisis Data Time Series. *JKA : Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 194–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i3.738>
- Anwar, R., Lydia, D., & Cicilia, P. (2016). Perbedaan kebahagiaan pada keluarga pra sejahtera dan sejahtera di Desa Modayag Kecamatan Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal E-Biomedik*, 4(2), 1–7.
- Arif Muhibbin, M. (2021). Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi Di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 4(2), 92–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. In Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.
- Dulkhan, M., & Nurjanah. (2018). Pengaruh kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas di kota bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 36–57.
- Lestari, A., Sumardjoko, B., Desstya, A., Rahmawati, L. E., & Fauziati, E. (2022). Kontribusi Perilaku Disruptif Terhadap Eksklusi Sosial Pada Anak Usia Sd. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(3), 880. <https://doi.org/10.33578/jpfkip.v11i3.8950>
- Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A. J., & Tumilaar, R. L. H. (2020). ANALISIS PENGARUH PDRB DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 66–78.
- Maulana, G. (2023). Eksklusi Sosial dalam Akses terhadap Pendidikan: Tinjauan dari Perspektif Keadilan. *Journal of Literacy Notes*. *Journal of Literacy Notes*, 1(2).
- Miles, M. B., Saldana, J., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. *Unite States of America: SAGE Publication*.
- Pasondi, M. (2024). EKSKLUSI SOSIAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA Studi Kasus : Kesenjangan Digital dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 477–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2250>
- Ramdass, G. (2010). Managerial communication - The key to continuous engagement and competitive advantage. *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS*, 8(3), 585–597.
- Riyansyah, A. (2011). *Eksklusi Hak-Hak Sipil Dan Konstruksi Identitas Eksklusi Hak-Hak Sipil Dan Konstruksi Identitas* (p. 279).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Walsh, K., & Urbaniak, A. (2023). Social exclusion and critical transitions in later life: Trajectories, forms and mechanisms. *Journal of Aging Studies*, 65, 101137. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101137>